

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Annisa Ramadhanty<sup>1</sup>, Henny Yulsiati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : [Annisaaramadhanty92@gmail.com](mailto:Annisaaramadhanty92@gmail.com)

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : [henny.yulsiati@yahoo.com](mailto:henny.yulsiati@yahoo.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dari analisis perbandingan laporan keuangan, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis trend dan analisis rasio. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020, diperoleh dari dokumentasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2020 antara lain : (1) Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil belum mandiri, (2) Rasio efektivitas PAD selama tahun 2016-2020 rata-rata menunjukkan hasil kurang efektif, (3) Rasio efisiensi belanja rata-rata menunjukkan sangat tidak efisien, (4) Rasio aktivitas yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga alokasi belanja modal relatif lebih kecil, (5) Rasio pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

**Kata kunci :** Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Abstract:** This study aims to analyze the financial performance of Regency/City Governments in South Sumatra Province as measured by comparative analysis of financial statements, analysis of percentage per component, analysis of sources and use of funds, trend analysis and ratio analysis. The data used in this study is secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA), Operational Reports (LO) and Balance Sheets of 17 Regency/City Governments in South Sumatra Province in 2016-2020, obtained from the documentation of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI). The data analysis technique uses financial ratio analysis. The results of the study show that the financial performance of the Regency/City Government in South Sumatra Province during 2016-2020, among others: (1) The regional financial independence ratio shows that the results are not yet independent, (2) the PAD effectiveness ratio during 2016-2020 averages less effective, (3) the average expenditure efficiency ratio shows very inefficient, (4) the ratio of activities owned by the regional government is still prioritized for operating expenditure needs so that the allocation of capital expenditure is relatively smaller, (5) the ratio of income growth fluctuates from year to year.

**Keywords :** District/City Government Financial Performance Analysis

### PENDAHULUAN

Pelaku ekonomi di Indonesia jika digolongkan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan setiap akhir tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menggambarkan kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan sasaran dan tujuan pemerintah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan (Halim : 2007).

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan mengenai bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana cara menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2016). Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan dan kinerja keuangan pemerintah.

Melihat dari latar belakang tersebut, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis mengambil judul: "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

## **LANDASAN TEORI**

Menurut PSAK No. 1 (2020: 2), "laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Sedangkan menurut Harahap (2015) "Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu".

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan Realisasi APBD disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD. Laporan Realisasi APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca  
Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
6. Laporan Arus Kas (LAK)  
LAK menyajikan informasi kas terkait aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data keuangan daerah Kabupaten Kota Sumatera Selatan berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 analisis yaitu Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, Analisa Persentase Per Komponen, Analisis Trend, Analisa Sumber dan Penggunaan Dana, dan Analisis Rasio karena yang digunakan adalah tiga laporan keuangan utama yang dijadikan acuan untuk menganalisis kinerja keuangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan

Berdasarkan Laporan Operasional Kabupaten Banyuasin tahun 2016-2020, akun pendapatan asli daerah tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun pendapatan transfer tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017-2018 mengalami penurunan dan tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Sehingga akun pendapatan tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun beban tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun surplus/defisit dari operasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus dan tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi defisit. Akun surplus/defisit dari kegiatan operasional tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus dan tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi defisit. Akun surplus/defisit-LO tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus dan tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi defisit.

Berdasarkan Laporan Operasional Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2020, akun pendapatan asli daerah tahun 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 mengalami penurunan, dan tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Akun pendapatan transfer tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.

Sehingga akun pendapatan tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun beban tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun surplus/defisit dari operasi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi defisit, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi defisit. Akun surplus/defisit-LO tahun 2017 mengalami penurunan menjadi defisit, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi defisit.

Berdasarkan Laporan Operasional Kota Palembang tahun 2016-2020, akun pendapatan asli daerah tahun 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun pendapatan transfer tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, dan tahun 2020 mengalami penurunan. Akun lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Sehingga akun pendapatan tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018 mengalami peningkatan, tahun 2019 mengalami penurunan, dan tahun 2020 mengalami peningkatan. Akun beban tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Akun surplus/defisit dari operasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi defisit, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi defisit. Akun surplus/defisit-LO tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi surplus, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi defisit, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi surplus, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi defisit.

2. Analisa Persentase Per Komponen

Diketahui bahwa hasil dari perhitungan jumlah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendominasi aset adalah kelompok aset tetap pada bagian Jalan, Irigasi dan Jaringan. Dalam 5 tahun ini, persentase yang dimiliki rata-rata diatas 65%. Sedangkan jumlah kewajiban paling tinggi ditahun 2016 yaitu sebesar 5,70%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh jumlah aset tertinggi pada bagian aset tetap yaitu bagian Jalan, Irigasi dan Jaringan. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata persentase di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 85%, sedangkan jumlah kewajibannya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,81%.

Diketahui bahwa hasil dari perhitungan jumlah pada Pemerintah Kota Palembang yang memperoleh persentase tertinggi adalah kelompok aset tetap pada bagian Tanah. Pada tahun 2016 = 17,47%, tahun 2017 = 52,63%, tahun 2018 = 49,33%, tahun 2019 32,03% dan tahun 2020 = 36,78%. Sedangkan jumlah kewajiban paling tinggi ditahun 2016 yaitu sebesar 4,69%.

3. Analisa Sumber dan Penggunaan Dana

Berdasarkan Neraca Kabupaten Banyuasin 2019 dan 2020, aset lancar mengalami penurunan, investasi jangka panjang mengalami penurunan, aset tetap mengalami peningkatan, aset lainnya mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan jumlah aset meningkat. Kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan, kewajiban jangka panjang mengalami peningkatan, ekuitas mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan jumlah kewajiban dan ekuitas mengalami peningkatan.

Berdasarkan Neraca Kabupaten Musi Rawas Utara 2019 dan 2020, aset lancar

mengalami penurunan, investasi jangka panjang mengalami peningkatan, aset tetap mengalami peningkatan, aset lainnya mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan jumlah aset meningkat. Kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan, ekuitas mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan jumlah kewajiban dan ekuitas mengalami peningkatan.

Berdasarkan Neraca Kota Palembang 2019 dan 2020, aset lancar mengalami peningkatan, investasi jangka panjang mengalami penurunan, aset tetap mengalami peningkatan, aset lainnya mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan jumlah aset meningkat. Kewajiban jangka pendek mengalami penurunan, ekuitas mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan jumlah kewajiban dan ekuitas mengalami peningkatan.

#### 4. Rasio Kemandirian

Tahun 2016, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 36,65% pada Kota Palembang dan rasio terendah sebesar 2,87% pada Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2017, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 47,30% pada Kota Palembang dan rasio terendah sebesar 6,11% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2018, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 40,12% pada Kota Palembang dan rasio terendah sebesar 3,47% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2019, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 120,80% pada Kabupaten Musi Rawas dan rasio terendah sebesar 3,96% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 255,49% pada Kabupaten Musi Rawas dan rasio terendah sebesar 3,77% pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Rata-rata rasio kemandirian yaitu 17,05% dengan nilai rata-rata tertinggi pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 80,17% pada Kabupaten Musi Rawas dan rata-rata terendah 4,71% pada Kabupaten Empat Lawang. Rata-rata rasio kemandirian tahun 2016 sebesar 8,78%, tahun 2017 sebesar 12,37%, tahun 2018 sebesar 10,01%, tahun 2019 sebesar 22,70%, dan tahun 2020 sebesar 31,38%.

#### 5. Rasio Efektivitas PAD

Tahun 2016 rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 111,68% pada Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur dan rasio terendah sebesar 29,65% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2017, rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 114,46% pada Kabupaten Ogan Komering Ulu dan rasio terendah sebesar 30,57% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2018 rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 115,94% pada Kabupaten Banyuasin dan rasio terendah sebesar 30,40% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2019 rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 935,27% pada Kota Lubuk Linggau dan rasio terendah sebesar 65,21% pada Kabupaten Palembang. Tahun 2020 rasio efektivitas PAD tertinggi sebesar 1049,27% pada Kota Lubuk Linggau dan rasio terendah sebesar 44,91% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Rata-rata rasio efektivitas PAD yaitu 109,12% dengan rata-rata tertinggi rasio efektivitas PAD pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 444,45% pada Kota Lubuk Linggau dan rata-rata terendah 42,49% pada Kabupaten Ogan Ilir. Rata-rata rasio efektivitas PAD tahun 2016 sebesar 86,75%, tahun 2017 sebesar 84,50%, tahun 2018 sebesar 88,18%, tahun 2019 sebesar 146,49% dan tahun 2020 sebesar 139,66%.

#### 6. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun 2016, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 91,21% pada Kabupaten Musi Rawas Utara, dan rasio terendah sebesar 75,89% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2017, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 95,07% pada Kabupaten Ogan

Komerling Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 79,20% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2018, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 95,07% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 75,50% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2019, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 94,75% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 82,80% pada Kota Palembang. Tahun 2020, rasio efisiensi belanja tertinggi sebesar 100,93% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, dan rasio terendah sebesar 73,83% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Rata-rata rasio efisiensi belanja yaitu 89,14% dengan nilai rata-rata tertinggi rasio efisiensi belanja pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 95,16% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur dan rata-rata terendah 83,76% pada Kabupaten Ogan Ilir. Rata-rata rasio efisiensi belanja tahun 2016 sebesar 87,12%, tahun 2017 sebesar 89,82%, tahun 2018 sebesar 89,02%, tahun 2019 sebesar 89,83% dan tahun 2020 sebesar 89,89%.

7. Rasio Belanja Rutin

Tahun 2016, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 83,10% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan rasio terendah sebesar 20,58% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2017, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 81,39% pada Kabupaten Banyuasin dan rasio terendah sebesar 54,59% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2018, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 85,85% pada Kabupaten Pagar Alam dan rasio terendah sebesar 48,50% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2019, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 83,72% pada Kabupaten Banyuasin dan rasio terendah sebesar 48,03% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2020, rasio belanja operasi tertinggi sebesar 74,66% pada Kabupaten Ogan Ilir dan rasio terendah sebesar 55,38% pada Kabupaten Empat Lawang. Rata-rata rasio belanja operasi yaitu 68,31% dengan nilai rata-rata tertinggi belanja operasi pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 77,39% pada Kabupaten Prabumulih dan rata-rata terendah 51,19% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Rata-rata rasio belanja operasi tahun 2016 sebesar 67,45%, tahun 2017 sebesar 70,84%, tahun 2018 sebesar 69,53%, tahun 2019 sebesar 66,66% dan tahun 2020 sebesar 67,07%.

8. Rasio Belanja Modal

Tahun 2016, rasio belanja modal tertinggi sebesar 49,29% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rasio terendah sebesar 16,89% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Tahun 2017, rasio belanja modal tertinggi sebesar 45,40% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 18,61% pada Kabupaten Banyuasin. Tahun 2018, rasio belanja modal tertinggi sebesar 51,50% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 14,12% pada Kabupaten Bengkulu Pagar Alam. Tahun 2019, rasio belanja modal tertinggi sebesar 51,94% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 21,21% pada Kabupaten Banyuasin. Tahun 2020, rasio belanja modal tertinggi sebesar 62,95% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rasio terendah sebesar 16,61% pada Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Rata-rata rasio belanja modal yaitu 27,70% dengan nilai rata-rata tertinggi rasio belanja modal pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 47,96% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rata-rata terendah 21,20% pada Kabupaten Banyuasin. Rata-rata rasio belanja modal tahun 2016 sebesar 28,67%, tahun 2017 sebesar 28,02%, tahun 2018 sebesar 25,32%, tahun 2019 sebesar 29,33% dan tahun 2020 sebesar 27,14%.

9. Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun 2015-2016 rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 156,19% pada Kabupaten Ogan Ilir dan rasio terendah -17,59% pada Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2016-2017 rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 207,89% pada Kabupaten Empat Lawang dan rasio terendah -12,80% pada Kabupaten Ogan Ilir. Tahun 2017-2018 rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 30,66% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah -53,18% pada Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2018-2019 rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 57,84% pada Kota Lubuk Linggau dan rasio terendah -18,39% pada Kota Pagar Alam. Tahun 2019-2020 rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 46,72% pada Kota Pagar Alam dan rasio terendah -48,22% pada Kota Lubuk Linggau. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan yaitu 15,05% dengan nilai rata-rata tertinggi rasio pertumbuhan pendapatan pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 31,76% pada Kabupaten Ogan Ilir dan rata-rata terendah -5,80% pada Kabupaten Lahat. Rata-rata rasio pertumbuhan Pendapatan tahun 2015-2016 sebesar 10,26%, tahun 2016-2017 sebesar 61,95%, tahun 2017-2018 sebesar -13,97%, tahun 2018-2019 sebesar 21,73% dan tahun 2019-2020 sebesar -4,71%.

#### 10. Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun 2016, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 96,05% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rasio terendah sebesar 68,28% pada Kota Palembang. Tahun 2017, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 93,84% pada Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 67,53% pada Kota Palembang. Tahun 2018, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 94,01% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rasio terendah sebesar 68,17% pada Kota Palembang. Tahun 2019, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 93,25% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rasio terendah sebesar 68,28% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahun 2020, rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi sebesar 91,52% pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan rasio terendah sebesar 62,81% pada Kota Palembang. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu 84,95% dengan nilai rata-rata tertinggi rasio ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu sebesar 92,61% pada Kabupaten Musi Rawas Utara dan rata-rata terendah 67,08% pada Kota Palembang. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2016 sebesar 87,23%, tahun 2017 sebesar 85,03%, tahun 2018 sebesar 86,49%, tahun 2019 sebesar 83,45% dan tahun 2020 sebesar 82,56%.

## KESIMPULAN

Kinerja Keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil belum mandiri, dikarenakan penerimaan pendapatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh peranan Pemerintah Pusat berupa pendapatan transfer. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efektivitas PAD selama tahun 2016-2020 rata-rata menunjukkan hasil kurang efektif, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2016-2020 belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efisiensi belanja rata-rata menunjukkan sangat tidak efisien. Hasil tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam pemungutan PAD untuk menghasilkan output (hasil) serta menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio aktivitas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan

untuk kebutuhan belanja operasi sehingga alokasi belanja modal relatif lebih kecil. Kinerja Keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya jumlah Pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Andirfa, 2018. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Lhokseumawe: Unimal press.
- Anshori, Z. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016–2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1113-1132
- Farida, Ai Siti, and Raden Faisal Maulana Nugraha. (2019). "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11.2 : 107-124.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 8(1), 33-48.
- Fahmi, (2011) Pengertian Kinerja Keuangan dan Tahapan dalam menganalisis Kinerja Keuangan "Tahapan-tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan Perusahaan". [Konsultasiskripsi.com](http://Konsultasiskripsi.com)
- Halim, (2016) *Penjelasan dan Pengertian Rasio* . [Eprints.umm.ac.id](http://Eprints.umm.ac.id)
- Halim, (2007) Pengertian Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan dan Rasio Pertumbuhan. [Eprints.ums.ac.id](http://Eprints.ums.ac.id)
- Manfaat Mengetahui Kinerja Keuangan Organisasi. <https://kamus.tokopedia.com/a/analisis-kinerja/>
- Mahmudi, (2017) *Pengertian Rasio Efisiensi*. [Repository.um-palembang.ac.id](http://Repository.um-palembang.ac.id)
- Perkasa, Lio Satria Putra.2021. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA*. Vol. 9. No. 1. Manado
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Daerah*.
- Politeknik Negeri Sriwijaya. (2019). *Buku Pedoman Skripsi*. Program Studi DIV Akuntansi Sektor Publik
- PSAK. (2015) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Sugiyono. 2015. *Pengertian Definisi Operasional*. [Repository.unika.ac.id](http://Repository.unika.ac.id)
- Sugiyono. 2018. *Pengertian Sample dan Wawancara*. [Repository.stei.ac.id](http://Repository.stei.ac.id)
- Sugiono,2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Hery. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. [Repository.ut.ac.id](http://Repository.ut.ac.id)
- Susanto, (2014). Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. [Repository.ums.ac.id](http://Repository.ums.ac.id)
- Supriadi, Yudi Nur. (2016). "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Kota Tangerang." *Forum Keuangan dan Bisnis V*.

Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 111-124.